



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 40 Telp.(0511) 4721203 Fax (0511) 4721909 Martapura
Website: www.dinkes.banjarkab.go.id E-Mail : dinkes@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 100.3.5.4/20/DINKES/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56); dan
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar untuk menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Banjar Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi seperti
yang tercantum dalam lampiran sebagai berikut :
- A. Lampiran I : Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II Lingkup
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
 - B. Lampiran II : Indikator Kinerja Pejabat Eselon III Lingkup Dinas
Kesehatan Kabupaten Banjar
 - C. Lampiran III : Indikator Kinerja Pejabat Eselon IV Lingkup
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
 - D. Lampiran IV : Indikator Kinerja Staf Lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar



Dr. H. NORIPANSYAH, S.SiT, MKM
Penata TK. I
NIP. 19801107 200312 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 100.3.5.4/20/DINKES/2026

TANGGAL : 15 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian Ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi (Kehamilan), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan / cedera Atau kejadian insedental. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 KH adalah Banyaknya kematian yang terjadi	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Kepala Dinas	Laporan Puskesmas, Register COD dan Aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)

			pada Ibu hamil karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas per 100.000 KH, Penyebab kematian antara lain : Pendarahan, infeksi, Eklamsi dan lain-lain.			
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 KH adalah Banyaknya kematian bayi dari 0 hari s/d 11 bulan 29 hari per 1.000 KH pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian antara lain : Sepsis, BBLR, Infeksi dan lain-lain.	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi di satu wilayah kerja}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 1000$			Laporan Puskesmas, Register COD dan Aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)
	Prevalensi Penyakit Menular (PM)	Prevalensi penyakit menular adalah angka kesakitan penyakit menular yang terdiri dari : 1. Tuberkulosis 2. HIV 3. ISPA 4. Diare 5. DBD 6. Hepatitis 7. Malaria 8. Kusta/Frambusia 9. Rabies 10. Kecacingan	$\frac{\text{Jumlah total Prevalensi penyakit menular (Tuberkulosis, HIV, ISPA, Diare, DBD, Hepatitis, Malaria, Kusta/Frambusia, Rabies, dan Kecacingan)}}{\text{Jumlah Penduduk di Kab. Banjar}} \times 100\%$			Laporan Bulanan masing-masing Program Penyakit Menular (PM)

		Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)	Prevalensi penyakit tidak menular adalah jumlah prevalensi Hipertensi, prevalensi Diabetes Melitus, prevalensi ODGJ Berat, Prevalensi kanker serviks, prevalensi kanker payudara, Prevalensi gagal ginjal kronik, prevalensi penyakit jantung koroner, prevalensi asma, prevalensi PPOK dan prevalensi stroke berdasarkan diagnosa dokter dibagi jumlah jenis penyakit tidak Menular	$\frac{\text{Jumlah total prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ berat, Kanker Servik, Kanker Payudara, Gagal Ginjal Kronik, Penyakit Jantung Koroner, Asma, PPOK, Stroke)}}{10 \text{ (Penyakit Tidak Menular)}} \times 100\%$		Laporan Puskesmas sepuluh penyakit Terbanyak Penyakit Tidak Menular (PTM)
2.	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi paripurna adalah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan predikat tertinggi dari Kementerian Kesehatan RI dan telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Jumlah Fasilitas kesehatan 51 terdiri dari : - 6 RS - 25 puskesmas - 1 Labkes	$\frac{\text{Fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi paripurna}}{\text{Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$		Sertifikat Akreditasi Fasyankes

			- 1 UTD - 18 Klinik			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan adalah Tolak Ukur atau Standar minimal untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar beserta seluruh UPTD : catatan : Jumlah UPTD 28 terdiri dari : - 25 puskesmas - 1 IFK - 1 Labkesda - 1 UPTD PSC 119	$\frac{\text{Nilai SKM Dinkes} + \text{jumlah Nilai SKM semua UPTD}}{\text{Jumlah Dinkes} + \text{UPTD (29)}} \times 100\%$		Nilai SKM Puskesmas dan SKM Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian diperoleh dari hasil penilaian tim evaluator AKIP atas implementasi SAKIP di perangkat daerah dengan instrumen yang sudah	Komponen penilaian : 1. Perencanaan kinerja 30% 2. Pengukuran kinerja 20% 3. Pelaporan kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian : 1. Sub-komponen keberadaan 20% 2. Sub-komponen kualitas 30% 3. Sub-komponen pemanfaatan 50% Kategori penilaian : AA : > 90-100 (Sangat Memuaskan)		

			dirumuskan Kementrian PAN dan RB	A : >80-90 (Memuaskan) BB : >70-80 (Sangat Baik) B : >60-70 (Baik) CC : >50-60 (Cukup Memadai) C : >30-50 (Kurang) D : > 0-30 (Sangat Kurang)		
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--



Plt. Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Banjar

Dr. H. NORIPANSYAH, S.SiT, MKM
 Penata TK. I
 NIP. 19801107 200312 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 100.3.5.4/20/DINKES/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEJABAT ESELON III
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB																								
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern di Dinkes Kabupaten Banjar	IKKI = (unsur kepatuhan x 50%)+ (unsur pelayanan umum x 50%) Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah dengan kategori : <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>>90-100</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>BB</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>B</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>CC</td><td>>60-70</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>C</td><td><60</td><td>Kurang</td></tr></table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	A	>90-100	Memuaskan	2	BB	>80-90	Sangat Baik	3	B	>70-80	Baik	4	CC	>60-70	Cukup	5	C	<60	Kurang	SEKRETARIS
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																										
1	A	>90-100	Memuaskan																										
2	BB	>80-90	Sangat Baik																										
3	B	>70-80	Baik																										
4	CC	>60-70	Cukup																										
5	C	<60	Kurang																										
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB)	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TBC) adalah angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau Treatment Success Rate (TSR) yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan	Jumlah angka kesembuhan (cure rate) semua kasus tuberkulosis paru yang terkonfirmasi bakteriologis yang ditemukan dan diobati ditambah jumlah angka pengobatan lengkap (complete rate) semua kasus tuberkulosis di Kabupaten Banjar dikali 100	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT																								

		Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Jumlah penderita Hipertensi yang tekanan darah Sistole nya <140mmHg dan diastole nya <90 mmHg, dalam kurun waktu 1 tahun, minimal 3 kali (3 bulan) dlm 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang tekanan darahnya terkendali}}{\text{Jumlah 20\% dari estimasi sasaran penderita hipertensi di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persentase individu usia ≥ 15 tahun di Kabupaten Banjar yang mengalami depresi	$\frac{\text{Jumlah individu usia } \geq 15 \text{ tahun yang mengalami depresi}}{\text{Jumlah seluruh individu usia } \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persentase individu usia >18 tahun di Kabupaten Banjar yang mengalami obesitas	$\frac{\text{Jumlah individu usia >18 tahun di Kabupaten Banjar yang mengalami obesitas}}{\text{Jumlah seluruh individu usia >18 tahun di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase Puskesmas Yang mencapai Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 85%	$\frac{\text{Persentase Puskesmas yang mencapai Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 85\%}}{\text{Jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, serta	Persentase Kasus kejadian luar biasa (KLB) yang tertangani kurang dari 24 jam	Jumlah KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	$\frac{\text{Jumlah kasus KLB yang ditangani <24 jam}}{\text{Jumlah kasus KLB}} \times 100\%$	

	kasus kejadian Luar biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) sesuai standar	Persentase penderita diabetes melitus yang dilayani sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2024 Tentang SPM Bidang Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita diabetes melitus di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persentase penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2024 Tentang SPM Bidang Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita hipertensi Sesuai Standar	Persentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2024 Tentang SPM Bidang Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita hipertensi di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita HIV Sesuai Standar	Persentase penderita HIV yang dilayani sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2024 Tentang SPM Bidang Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penderita HIV yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita HIV di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar	Persentase penderita Tuberkulosis (TB) yang dilayani sesuai standar (Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2024 Tentang SPM Bidang Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penderita Tuberkulosis(TB) yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran penderita Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	

		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah cakupan deteksi dini penyakit tidak menular pada usia produktif (15-59 tahun)	$\frac{\text{Jumlah cakupan deteksi dini penyakit tidak menular pada usia produktif (15-59 tahun) sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran usia produktif(15-59 tahun) di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
4.	Meningkatnya kualitas gizi keluarga	Prevalensi Wasting	Anak yang berumur 0-59 bulan 29 hari dengan kategori status gizi berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB dengan z-score kurang dari -2 SD	$\frac{\text{Jumlah balita memiliki indeks BB/PB-TB Kurang dari -2SD}}{\text{Jumlah Seluruh balita yang diukur indeks BB/PB-TB}} \times 100\%$	
		Persentase Ibu Hamil Resiko KEK	Ibu hamil dengan risiko kurang energi kronis (KEK) ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil resiko KEK}}{\text{Jumlah bumil yang diukur LILA}} \times 100\%$	
5.	Meningkatnya pelayananan kesehatan ibu, anak, usia produktif dan lansia sesuai standar	Persentase Ibu Hamil yang terlayani sesuai standar	Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6x dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 2x pada trimester ke 2, 3x pada trimester ke 3, dengan diperiksa oleh dokter minimal 1x pada trimester 1 dan minimal 1x pada trimester 3 di suatu wilayah kerja kurun waktu dalam 1 tahun yang sama	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal (K6) sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran ibu bumil}} \times 100\%$	
		Persentase ibu bersalin yang terlayani sesuai standar	Cakupan ibu yang melaksanakan persalinan di Fasilitas Kesehatan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu yang melaksanakan persalinan di Fasilitas Kesehatan}}{\text{Jumlah ibu bersalin}} \times 100\%$	

Persentase bayi baru lahir yang terlayani sesuai standar	Bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 s.d hari ke 7, 1 kali pada hari ke 8 s.d hari ke 28 setelah lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3 s.d hari ke 7, 1 kali pada hari ke 8 s.d hari ke 28 setelah lahir}}{\text{Jumlah bayi baru lahir}} \times 100\%$
Persentase Balita yang terlayani sesuai standar	Persentase balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit, dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan.	$\frac{\text{Jumlah balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
Persentase lansia yang terlayani sesuai standar	Jumlah lansia (60 tahun ke atas) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar meliputi : pelayanan edukasi baik di faskes, UKBM atau kunjungan rumah, pelayanan skrining faktor resiko minimal 1 kali dalam setahun (Pengukutan TB, BB dan lingkaran perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah lansia yang diberi pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh Lansia}} \times 100\%$

			Gangguan mental dan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut), serta tindak lanjut hasil skrining (memberikan penyuluhan kesehatan melakukan rujukan jika diperlukan)		
		Persentase usia pendidikan dasar yang terlayani sesuai standar	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga usia pendidikan dasar yang diberi pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh warga usia Pendidikan dasar}} \times 100\%$	
6	Meningkatkannya kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemicu STBM	Puskesmas yang melaksanakan pemicuan 5 pilar (SBS, CTPS, Pengelolaan Makanan dan Air, Pengelolaan Sampah Domestik, dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan STBM dengan pemicuan}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga minimal 3 indikator yaitu adanya pengukuran kebugaran haji, anak sekolah dan ASN	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Kerja	Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja (sektor Formal dan sektor Informal)	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$	

7.	Meningkatnya Kualitas Gerakan promotif dan preventif Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$	
8.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 5 Tatanan Masyarakat	Persentase capaian PHBS di 5 Tatanan Masyarakat yaitu Rumah Tangga, Sekolah, Sarana Kesehatan, Tempat Umum dan Tempat Kerja dan harus memenuhi semua Indikator (RT 10 Indikator, Sekolah 8 Indikator, Sarkes 6 Indikator, Tempat Umum 7 Indikator, Tempat Kerja 8 Indikator)	$\frac{\text{Jumlah capaian 5 Tatanan ber-PHBS di masyarakat}}{5 \text{ tatanan PHBS di masyarakat}} \times 100\%$	
		Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persentase Penduduk Usia ≥ 10 Tahun Melakukan Aktivitas Fisik ≥ 150 Menit Dalam 1 Minggu Dengan Intensitas Sedang dan Berat; Jalan, Joging, Lari, Sepeda, Senam, Bulu Tangkis	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia } \geq 10 \text{ Tahun Melakukan Aktifitas Fisik}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } \geq 10 \text{ Tahun}} \times 100\%$	
9.	Meningkatnya akses layanan kesehatan	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standar	Total persentase Faskes yang menggunakan sirsute + total persentase RS yang respon time sirsute kurang dari 5 menit + Persentase RS mampu dan Puskesmas diampu pelaksanaan telemedisin	$\frac{\text{Jumlah persentase Faskes yang aktif menggunakan sirsute + persentase RS sirsute respon time kurang dari 5 menit + RS mampu telemedisin dan Puskesmas diampu telemedisin}}{3} \times 100\%$	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
		Cakupan kepesertaan Jaminan	Jumlah penduduk (jiwa) di Kabupaten Banjar yang memiliki Jaminan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa) yang menjadi peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk (jiwa) di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	

		Kesehatan Nasional (JKN)		Jumlah penduduk di Kabupaten Banjar	
		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah sasaran (46% jumlah penduduk)	$\frac{\text{Jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia}}{\text{Jumlah sasaran (46\% jumlah penduduk) Di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
10.	Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan alat kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik dan Labkesmas) yang memiliki sarana sesuai standar dengan nilai ASPAK minimal 60 %	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang memiliki sarana sesuai standar}}{\text{Jumlah Fasyankes yang terdaftar di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik dan Labkesmas) yang memiliki alat kesehatan sesuai standar dengan nilai AAK minimal 60 %	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang memiliki alat kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Fasyankes yang terdaftar di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Klinik dan Labkesmas) yang memiliki prasarana sesuai standar dengan nilai ASPAK minimal 60 %	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang memiliki prasarana sesuai standar}}{\text{Jumlah Fasyankes yang terdaftar di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME)	Fasilitas Pelayanan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, TPMD dan TPMDG) yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) dan sudah terintegrasi ke Satu Sehat	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi ke Satu Sehat}}{\text{Jumlah Fasyankes yang menjadi target tahun berjalan}} \times 100\%$	

		terintegrasi			
11.	Meningkatnya pemenuhan dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, TPMD dan TPMDG) yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas}}{\text{Jumlah Fasyankes yang menjadi target tahun berjalan}} \times 100\%$	
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengikuti Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan}} \times 100\%$	
12	Meningkatnya kualitas kefarmasian	Persentasi fasilitas kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	

		Persentase apotek dan toko obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Apotek dan Toko Obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar}}{\text{Jumlah Apotek dan Toko Obat yang sudah berijin}} \times 100\%$	
--	--	--	--	--	--

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar



Dr. H. NORIPANSYAH, S.SiT, MKM
Penata TK. I
NIP. 19801107 200312 1 004

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR : 100.3.5.4/20/DINKES/2026
 TANGGAL : 15 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEJABAT ESELON IV
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
 TAHUN 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan SKPD Sesuai Dengan Ketentuan.	Dokumen perencanaan terdiri dari : Renstra, Renstra Perubahan / reviu renstra, Renja, Renja Perubahan, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Tabel Keselarasan. Dokumen penganggaran terdiri dari : RKA Murni, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Pergeseran, DPA Perubahan. Dokumen evaluasi terdiri dari : LPPD, LKPJ, LKJIP Laporan Kinerja per triwulan. Laporan Rencana Kerja. Yang dimaksud tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas dapat diselesaikan penyusunannya sesuai	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi}}{\text{Total Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi}} \times 100\%$	SUBBAG PERENCANAAN

			dengan waktu yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan : bahwa dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut di atas mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dokumen yang disusun.		
2	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi kepegawaian terdiri dari : 1. Fasilitas Kenaikan Pangkat 2. Kenaikan Gaji Berkala 3. Cuti 4. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 5. Mutasi 6. Pendidikan dan Pelatihan pegawai bimtek) 7. SLKS 8. Pensiun 9. Perceraian 10. Penegakan Disiplin	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang telah terpenuhi sesuai kebutuhan dan tepat waktu}}{\text{Total administrasi kepegawaian yang masuk sesuai kebutuhan dan waktunya}} \times 100\%$	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Pengadaan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri		

	Pemerintahan Daerah		atas paket ; 1. Belanja honorarium, 2. Belanja modal alat kantor, 3. Belanja modal alat rumah tangga, 4. Belanja modal meja dan kursi kerja/raat pejabat, 5. Belanja modal unit computer, 6. Belanja modal peralatan computer.	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Pengadaan barang milik daerah sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan}} \times 100\%$	
4	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	Yang dimaksud dengan Pemeliharaan BMD adalah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik meliputi pemeliharaan kondisi fisik, mesin beserta pemenuhan kelengkapan administrasi kendaraannya	Jumlah Bulan Layanan x 100%	
5	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administasi Umum perangkat daerah yang berkualitas.	Penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran merupakan segala kegiatan administrasi kantor seperti ; 1. Pemenuhan komponen listrik 2. Pemenuhan logistik kantor ATK ,makan minum 3. Bahan pembersih dan jasa retribusi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan penunjang administrasi perkantoran yg terfasilitasi sesuai kebutuhan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah kegiatan penunjang administrasi perkantoran dipenuhi sesuai kebutuhan}} \times 100\%$	

			kebersihan kantor.		
6	Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi sesuai rencana kebutuhan	Jasa penunjang pelayanan umum kantor adalah pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi penyediaan jasa penunjang pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan yaitu ; 1. Penyedia jasa komunikasi, 2. Sumber daya air dan Listrik	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang pelayanan umum kantor yang telah terpenuhi tepat waktu sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah jasa penunjang pelayanan umum kantor yang dipenuhi sesuai kebutuhan dan waktunya}} \times 100\%$	
7	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terdiri dari: 1. Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU), 2. Langsung (LS), Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut dalam penyelesaian harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan / tidak boleh terlambat	$\frac{\text{Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan SKPD yang disusun tepat waktu dan tepat mutu}}{\text{Jumlah seluruh dokumen penatausahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan SKPD yang disusun}} \times 100\%$	SUBBAG KEUANGAN

8	Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan.	Dokumen barang milik daerah terdiri dari: 1. Dokumen Pengadaan BMD, Pendistribusian BMD dan Pengamanan BMD 2. Dokumen Laporan BMD, 3. Dokumen RKBMD, 4. Dokumen RKPBMd,	$\frac{\text{Jumlah dokumen barang milik daerah yang dibuat tepat waktu}}{\text{Jumlah semua dokumen pengelolaan barang milik daerah}} \times 100\%$	
9	Terlaksananya pencegahan penyakit menular	Persentase deteksi dini terduga Tuberkulosis	Deteksi dini sesuai standar dengan melakukan pemeriksaan klinis dan dilakukan pemeriksaan sputum (Permenkes no.67 tahun 2016)	$\frac{\text{Jumlah cakupan deteksi dini terduga tuberkulosis yang terlayani}}{\text{Jumlah sasaran terduga tuberkulosis}} \times 100\%$	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
		Persentase deteksi dini orang yang berisiko HIV	Deteksi dini yang dilakukan dengan pengambilan sampel darah terhadap orang atau kelompok yang berisiko tertular HIV (Permenkes no.23 tahun 2022)	$\frac{\text{Jumlah cakupan deteksi dini orang berisiko HIV yang terlayani}}{\text{Jumlah sasaran deteksi dini orang berisiko HIV}} \times 100\%$	
		Persentase deteksi dini penyakit Malaria	Deteksi dini yang dilakukan dengan pengambilan sampel darah terhadap orang yang berisiko tertular penyakit malaria (Permenkes no.22 tahun 2022)	$\frac{\text{Jumlah cakupan deteksi dini penyakit malaria yang terlayani}}{\text{Jumlah sasaran deteksi dini penyakit malaria yang ada di Kab. Banjar}} \times 100\%$	

10	Terlaksananya pengendalian penyakit menular	Prevalensi Penyakit Malaria dengan API 0,104 per 1.000 penduduk	Prevalensi penyakit malaria dengan API 0,104 (berdasarkan tahun 2024) per 1.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah kasus malaria dalam 1 tahun dengan pemeriksaan API}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase cakupan pelayanan penyakit menular lainnya	Jumlah persentase kasus penyakit menular langsung (ISPA, kusta/frambusia, diare, hepatitis) dan bersumber binatang (DBD, rabies, kecacikan) selain penyakit menular utama yang ditemukan dan terlayani sesuai standar di fasyankes (Permenkes no.82 tahun 2014)	$\frac{\text{Jumlah persentase pelayanan penyakit menular lainnya}}{\text{Jumlah penyakit menular lainnya yang ada di Kabupaten Banjar (7)}} \times 100\%$	
		Persentase kunjungan penderita Tuberkulosis	Pelayanan orang dengan tuberkulosis sesuai dengan Permenkes no.67 tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang terlayani}}{\text{Jumlah sasaran orang dengan tuberkulosis}} \times 100\%$	
		Persentase kunjungan orang terduga HIV	Pelayanan orang dengan HIV sesuai dengan Permenkes no.23 tahun 2022	$\frac{\text{Jumlah orang dengan HIV yang terlayani}}{\text{Jumlah sasaran orang dengan HIV}} \times 100\%$	

11	Terlaksananya pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Persentase Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Prioritas	Persentase deteksi dini 9 penyakit tidak menular prioritas (hipertensi, diabetes melitus, stroke, kanker payudara, kanker serviks, obesitas, PPOK, gangguan indera fungsional penglihatan, gangguan indera fungsional pendengaran) pada penduduk kabupaten Banjar	$\frac{\text{Jumlah Persentase deteksi dini 9 penyakit tidak menular prioritas (deteksi dini hipertensi, deteksi dini diabetes melitus, deteksi dini stroke, deteksi dini kanker payudara, deteksi dini kanker serviks, deteksi dini obesitas, deteksi dini PPOK, deteksi dini gangguan indera fungsional penglihatan, deteksi dini gangguan indera fungsional pendengaran)}}{\text{Penyakit tidak menular prioritas (9)}} \times 100\%$	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
		Persentase merokok usia 10 - 21 Tahun	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun di Kabupaten Banjar (Perpres No.12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10-21 tahun yang merokok}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 10-21 tahun di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
12	Terlaksananya pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	Persentase kunjungan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah sasaran penderita hipertensi di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase kunjungan penderita orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah sasaran penderita orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	

		Persentase Kunjungan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah sasaran penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
13	Terlaksananya surveilans epidemiologi	Persentase Laporan Surveilans Terpadu penyakit sesuai standar	Persentase Fasyankes yang menyampaikan jumlah laporan surveilan terpadu penyakit sesuai standar Secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah puskesmas dan RSUD yang menyampaikan laporan secara lengkap}}{\text{Jumlah Puskesmas dan RSUD yang ada di Kab. Banjar}} \times 100\%$	SEKSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN IMUNISASI
		Persentase Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam	Persentase Puskesmas yang merespon kejadian luar biasa dalam waktu 1 x 24 jam (25 UPTD Puskesmas + 1 RSUD)	$\frac{\text{Jumlah Respon 1x24 jam}}{\text{Jumlah KLB}} \times 100\%$	
		Persentase Pemeriksaan Kesehatan Haji	Persentase Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan haji	$\frac{\text{Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatannya}}{\text{Jumlah keseluruhan jemaah haji}} \times 100\%$	
14	Terlaksananya program imunisasi	Persentase Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)	semua anak usia 0-11 bulan sudah mendapatkan 1 dosis HB0 usia 0-7hari, 1 dosis BCG, 4 dosia bOPV, 2 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib, 2 dosia PCV, 3 Dosis Rotavirus serta 1 dosia Campak Rubella (MR)	$\frac{\text{Semua bayi yg sudah mendapat Imunisasi dasar lengkap}}{\text{Sasaran bayi di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Cakupan Imunisasi tetanus	Persentase Cakupan Imunisasi Tetanus pada		

		pada Wanita Usia Subur (WUS)	wanita usia subur (WUS)	$\frac{\text{Jumlah cakupan Imunisasi Tetanus}}{\text{Jumlah ibu hamil dan calon pengantin}} \times 100\%$	
15	Meningkatnya cakupan layanan gizi	Cakupan gizi buruk ditangani sesuai tata laksana	Balita usia 0 – 59 bulan yang memiliki tanda klinis gizi buruk dan atau Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai z- score kurang dari - 3 SD atau Lingkar Lengan Atas (LiLA) <11.5 cm pada balita usia 6-59 bulan yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat sesuai dengan tata laksana gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk usia 0-59 bulan mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk}}{\text{Jumlah balita gizi buruk usia 0-59 bulan}} \times 100\%$	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
		Cakupan gizi kurang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Balita usia 6 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score -3 SD sampai kurang dari -2 SD yang mendapat tambahan asupan gizi selain makanan utama dalam bentuk makanan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan}}{\text{Jumlah balita gizi kurang}} \times 100\%$	

			tambahan (baik pabrikan maupun berbasis pangan lokal)		
		Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja Perempuan berusia 12-18 tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat mendapat tablet tambah darah (TTD) seminggu sekali yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60mg besi elemental dan 0,4mg asam folat	$\frac{\text{Jumlah remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)}}{\text{Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah}} \times 100\%$	
		Cakupan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 tablet/ Multiple Micronutrient Supplement (MMS)	Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat/ Multiple Micronutrient Supplement (MMS) yang disediakan oleh pemerintah minimal 180 tablet selama masa kehamilan	$\frac{\text{Jumlah bumil mendapatkan minimal 180 Tablet Tambah Darah (TTD)}}{\text{Jumlah ibu hamil yang ada}} \times 100\%$	
		Cakupan Bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ditandai oleh Indeks Massa Tubuh (IMT) pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤ 12 minggu) dibawah 18,5 kg/m ² dan atau Ibu hamil risiko KEK dideteksi dengan ukuran	$\frac{\text{Jumlah Bumil KEK mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)}}{\text{Jumlah ibu hamil KEK}} \times 100\%$	

			lingkar lengan atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm yang yang mendapat tambahan asupan gizi selain makanan utama dalam bentuk makanan tambahan (baik pabrikan maupun berbasis pangan lokal)		
16	Meningkatnya kunjungan pelayanan siklus hidup	Persentase Kunjungan Ibu Hamil	Ibu hamil yang melakukan kunjungan ke Posyandu, kunjungan rumah, maupun kunjungan ke Puskesmas sedikitnya 6 kali kunjungan dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 2x pada trimester ke 2, 3x pada trimester ke 3, dengan diperiksa oleh dokter minimal 1x pada trimester 1 dan minimal 1x pada trimester 3 selama periode kehamilan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan ke Posyandu, kunjungan rumah, maupun kunjungan ke Puskesmas sedikitnya 6 kali kunjungan dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1, 2x pada trimester ke 2, 3x pada trimester ke 3, dengan diperiksa oleh dokter minimal 1x pada trimester 1 dan minimal 1x pada trimester 3 selama periode kehamilan}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil}} \times 100\%$	
		Persentase Kunjungan Balita	Anak usia 0-59 bulan yang melakukan kunjungan ke Posyandu, kunjungan rumah, maupun kunjungan di Puskesmas	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang melakukan kunjungan ke Posyandu, kunjungan rumah maupun Kunjungan puskesmas}}{\text{Jumlah sasaran balita 0-59 bulan}} \times 100\%$	
		Persentase penjangkauan anak usia pendidikan dasar di sekolah	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilakukan penjangkauan di sekolah dalam kurun	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilakukan penjangkauan di sekolah}}{\text{Jumlah seluruh siswa pendidikan dasar di sekolah}} \times 100\%$	

			waktu satu tahun		
		Persentase Kunjungan Lansia	Orang usia 60 tahun atau lebih yang melakukan kunjungan ke posyandu, kunjungan rumah maupun kunjungan ke Puskesmas	$\frac{\text{Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang melakukan kunjungan ke posyandu, kunjungan rumah maupun kunjungan ke Puskesmas}}{\text{Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih}} \times 100\%$	
17	Meningkatnya Cakupan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan air limbah	Fasyankes meliputi UPTD Puskesmas dan Labkesda yang telah melakukan pengelolaan limbah cair yang berfungsi dengan melakukan pemeriksaan air limbah minimal 1 kali dalam setahun (5 Puskesmas)	$\frac{\text{Jumlah fasyankes yang telah melakukan pengelolaan air limbah}}{\text{Jumlah fasyankes yang mempunyai instalasi pengelolaan air limbah yang berfungsi}} \times 100\%$	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
		Persentase Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)	Fasyankes meliputi UPTD Puskesmas dan Labkesda yang telah melakukan pengelolaan limbah medis infeksius padat dan atau bekerjasama dengan jasa pengelolaan limbah medis	$\frac{\text{Jumlah fasyankes yang telah melakukan pengelolaan limbah medis infeksius dan atau bekerja sama dengan jasa pengelola limbah medis}}{\text{Jumlah seluruh fasyankes}} \times 100\%$	
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai	Tempat dan fasilitas umum (pasar, sekolah, puskesmas) yang dilakukan pengawasan		

	Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	(Inspeksi Kesehatan Lingkungan) minimal 1 kali dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) minimal 1 kali dalam setahun}}{\text{Jumlah seluruh TFU}} \times 100\%$	
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	TPP yang dilakukan pengawasan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah TPP yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah TPP}} \times 100\%$	
	Persentase Desa/Kelurahan dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/kelurahan berkomitmen yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi dalam bentuk dokumen pernyataan masyarakat dan kepala desa berkomitmen untuk merubah perilaku tidak membuang air besar sembarangan	$\frac{\text{Jumlah sarana air minum yang diawasi dengan inspeksi Kesehatan}}{\text{Jumlah sarana yang ada}} \times 100\%$	
	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inspeksi Kesehatan	Sarana air minum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan lingkungan (IKL) dan diperiksa kualitas air minumnya . Maksud dari diawasi /diperiksa adalah petugas	$\frac{\text{Jumlah sarana air minum yang diawasi dengan inspeksi Kesehatan}}{\text{Jumlah sarana yang ada}} \times 100\%$	

		Lingkungan (IKL)	kesehatan lingkungan melakukan pengawasan eksternal melalui observasi lapangan (IKL) dan uji kualitas air (laboratorium atau alat yang terkalibrasi)		
18	Meningkatnya sektor formal (Puskesmas) yang melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga	Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, tersedianya SK atau SE yang mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kerja dan melakukan skrining kesehatan kerja di sektor formal	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$	
		Persentase puskesmas melaksanakan fasilitasi Aktifitas Fisik (Olahraga)	Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga berupa pengukuran kebugaran mencakup 2 indikator diantara ASN /anak sekolah/jamaah haji, melakukan pembinaan kelompok olahraga pada masyarakat, ibu hamil dan lansia serta pengukuran kebugaran jasmani pekerja	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$	
		Persentase Puskesmas yg menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perkantoran	Puskesmas yang menerapkan K3 Perkantoran (adanya SOP, Peta Identifikasi Bahaya, Jalur dan Tanda Evakuasi, Ketersediaan	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang Menerapkan K3 perkantoran}}{\text{Jumlah sarana yang ada}} \times 100\%$	

			APAR) minimal 3 kriteria		
19	Meningkatnya pergerakan masyarakat dalam pelaksanaan promotif dan preventif	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas	Puskesmas yang melaksanakan promotif dan preventif dengan Melaksanakan Pembinaan Germas dengan indikator sesuai PMK No. 21 Tahun 2023 (Melaksanakan pergerakan Germas dengan Tema Prioritas, Melaksanakan Skrining Kesehatan di tempat Kerja minimal 2 kali dalam 1 tahun, Melaksanakan pembinaan Kesehatan tradisional)	$\frac{\text{Puskesmas Yang Melaksanakan Promotif Dan Preventif berupa pembinaan Germas}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
20	Meningkatnya penilaian rumah tangga, sekolah, sarana kesehatan, tempat umum dan tempat kerja ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (memenuhi 10 indikator)	$\frac{\text{Jumlah RT ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	
		Persentase sekolah yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Sekolah yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	$\frac{\text{Jumlah sekolah ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)}}{\text{Jumlah seluruh sekolah}} \times 100\%$	

		Persentase sarana kesehatan yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Sarana kesehatan yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	$\frac{\text{Jumlah sarana kesehatan ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)}}{\text{Jumlah seluruh sarana kesehatan}} \times 100\%$	
		Persentase tempat umum yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Tempat umum yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	$\frac{\text{Jumlah tempat umum ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)}}{\text{Jumlah seluruh tempat umum}} \times 100\%$	
		Persentase tempat kerja yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Tempat kerja yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	$\frac{\text{Jumlah tempat kerja ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)}}{\text{Jumlah seluruh tempat kerja}} \times 100\%$	
21	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan.	Persentase Posyandu Aktif	Posyandu aktif adalah Posyandu yang memenuhi Indikator Keaktifan Posyandu sesuai dengan PMK No. 13 Tahun 2023 yaitu memenuhi 3 (tiga) indikator (Melakukan kegiatan rutin Posyandu setiap bulan (minimal 10X dalam setahun) ,melayani siklus hidup (memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil/menyusui, bayi/balita, remaja/usia sekolah,usia produktif dan lansia), dan Memiliki minimal 5 orang kader)	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Posyandu}} \times 100\%$	

22	Meningkatnya pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	UKBM (Poskesdes, Posyandu dan SBH) aktif adalah UKBM yang memenuhi indikator keaktifan (Poskesdes buka setiap hari, ada petugas kesehatan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Posyandu aktif adalah buka minimal 10x dalam setahun, mempunyai minimal 5 orang kader, melaksanakan layanan siklus hidup. SBH aktif adalah melaksanakan 6 krida, terbentuknya pangkalan SBH di jenjang tingkat pendidikan menengah dan atas.	$\frac{\text{Jumlah UKBM Aktif}}{\text{Jumlah UKBM}} \times 100\%$	
23	Terlaksananya akses pembiayaan kesehatan yang berkualitas ke seluruh penduduk	Persentase peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Masyarakat yang terdaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan status aktif pada periode tertentu	$\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Kesehatan aktif (kecuali PBI APBN)}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PEMBIAYAAN

24	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) terdaftar di Puskesmas yang melaksanakan layanan skrining Kesehatan	Peserta terdaftar di Puskesmas yang melakukan skrining kesehatan di web skrining BPJS Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah total skrining kesehatan di web skrining BPJS Kesehatan}}{\text{Total peserta BPJS kesehatan terdaftar di Puskesmas}} \times 100\%$		
		Persentase capaian kapitasi berbasis kinerja (KBK) 100% di Puskesmas.	Puskesmas yang memenuhi KBK 100% dalam periode bulan	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang mencapai KBK 100\%}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas}} \times 100\%$		
25	Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	Persentase Puskesmas dan Klinik, Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD), Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (TPMDG), praktik perawat mandiri dan praktik bidan mandiri telah menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Sistem rujukan terintegrasi yang menghubungkan data pasien dari Puskesmas, Klinik, Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD) / Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (TPMG) praktik perawat mandiri dan praktik bidan mandiri ke tingkat layanan lebih tinggi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas, klinik, TPMD/TPMG praktik perawat mandiri dan praktik bidan mandiri yang melaksanakan Sistrute}}{\text{Seluruh jumlah Puskesmas, Klinik, TPMD/TPMDG, praktik perawat mandiri dan praktik bidan mandiri yang teregistrasi kemenkes di Kab. Banjar}} \times 100\%$		
		Persentase Rumah Sakit (RS) yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang berkualitas	Sistem Rujukan Terintegrasi yang Menghubungkan data pasien dari FKTP ke FKTL atau FKTL ke FKTL lanjutannya baik vertikal maupun horizontal	$\frac{\text{Jumlah RS yang melaksanakan Sistrute berkualitas (Respon Time < 5 mnt minimal 25\%)}}{\text{Seluruh RS di Kab. Banjar}} \times 100\%$		

		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang mampu dan diampu dalam melaksanakan telemedicine.	Telemedicine dalam hal sistem komunikasi konsultasi dari FKTP ke FKRTL	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas dan RS yang mampu dan diampu dalam melaksanakan telemedicine}}{\text{Jumlah total Puskesmas dan RS}} \times 100\%$		
26	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjutan yang bermutu	Persentase rumah sakit dibina, melaksanakan dan melaporkan audit medis pada 9 layanan prioritas	Pembinaan dan Pelaksanaan audit medis oleh Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Banjar	$\frac{\text{Jumlah RS yang telah dilakukan pembinaan dan telah melakukan pelaksanaan audit medis}}{\text{Jumlah RS di Kab. Banjar}} \times 100\%$		
		Persentase fasilitas kesehatan lanjutan dengan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indikator Keselamatan Pasien (IKP) 100%	Data INM dan IKP RS di wilayah Kabupaten Banjar dengan persentase 100% pada periode tertentu dalam web mutu fasyankes kemenkes	$\frac{\text{Jumlah RS dengan INM dan IKP 100% pada website mutu fasyankes kemenkes}}{\text{Jumlah RS di Kab. Banjar}} \times 100\%$		
27	Terlaksananya Perizinan Bidang Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 80%	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Praktik Mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Klinik Pratama, Puskesmas) yang dikendalikan,	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya}}{\text{Jumlah seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERIZINAN	

			diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 60%	Persentase Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut (RS kelas D, RS kelas C, Klinik Utama) yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya dengan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya}}{\text{Jumlah seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya minimal 90%	Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang diajukan pelaku usaha sektor kesehatan pada sistem aplikasi OSS-RBA dengan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan di Kabupaten Banjar pada tahun berjalan}} \times 100\%$	
28	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional minimal	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi minimal 2 dari 4 kriteria yaitu	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi minimal 2 dari 4 kriteria yaitu (1) melakukan}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	

		70% dari kriteria	(1) melakukan pelayanan kesehatan tradisional; (2) melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri; (3) melakukan pendataan penyehat tradisional; (4) memiliki ruang terbuka hijau dalam bentuk tanaman obat keluarga	pelayanan kesehatan tradisional; (2) melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri; (3) melakukan pendataan penyehat tradisional; (4) memiliki ruang terbuka hijau dalam bentuk tanaman obat keluarga Jumlah puskesmas yang ada di Kab Banjar	
		Persentase Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Griya Sehat Kabupaten Banjar sesuai standar minimal 50%	Griya Sehat Kabupaten Banjar memberikan 4 jenis pelayanan dari 8 jenis pelayanan sesuai standar yaitu : akupunktur, akupresur, bekam, hypnotherapy, pijat bayi/balita, ramuan, herbal, konseling pemanfaatan TOGA	Jumlah Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Griya Sehat Kabupaten Banjar sesuai standar Jumlah pelayanan pada Griya Sehat sesuai standar x 100%	
29	Meningkatnya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang mendapat pembinaan terpadu	Puskesmas yang telah dilakukan pembinaan terpadu oleh tim pembina cluster binaan (TPCB) oleh dinas kesehatan kab/kota	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan oleh TPCB Jumlah puskesmas yang ada di Kab Banjar x 100%	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN AKREDITASI
		Persentase Fasilitas Kesehatan tingkat	Fasyankes (Puskesmas, Klinik, TPMD dan		

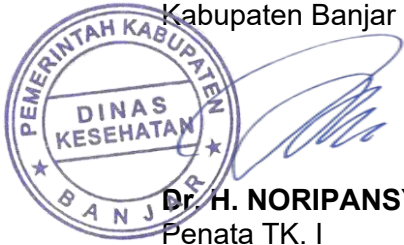
		pertama yang mendapatkan pembinaan mutu pelayanan	TPMDG) yang melakukan pengukuran INM pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah fasyankes yang dilakukan pengukuran INM}}{\text{Jumlah fasyankes yang ada di Kab. Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan pembinaan labkesmas tier 1 dan tier 2	Faskes (Puskesmas adalah Labkesmas tier 1 dan Labkesda adalah Labkesmas tier 2) yang mendapat pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah faskes pembinaan labkesmas tier 1 dan labkesmas tier 2}}{\text{Jumlah faskes yang ada di Kab. Banjar}} \times 100\%$	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil dan sangat terpencil	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil}}{\text{Jumlah puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil yang ada di Kab. Banjar}} \times 100\%$	
30	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk Pelatihan atau Tugas Belajar	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengikuti pengembangan pelatihan}}{\text{Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjadi target pada tahun berjalan}} \times 100\%$	SEKSI DATA, INFORMASI KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Persentase jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Puskesmas yang memiliki minimal 9 dari 14 Jenis Tenaga (Medis dan Tenaga Kesehatan) sesuai dengan PMK No 19 Tahun 2024	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 9 dari 14 jenis (Tenaga Medis dan tenaga kesehatan sesuai standar)}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas (25)}} \times 100\%$	

31	Meningkatnya penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) Fasyankes	Persentase Rekam Medis Elektronik (RME) Fasyankes yang mengirimkan data ke satu sehat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, TPMD dan TPMDG yang mengirimkan data pelayanan kesehatan melalui Rekam Medis Elektronik (RME) ke Satu Sehat	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang mengirimkan data pelayanan kesehatan melalui Rekam Medis Elektronik (RME)}}{\text{Jumlah fasyankes yang terintegrasi satu sehat}} \times 100\%$	
32	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan kefarmasian	Persentase puskesmas yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi sesuai standar.	Pengelolaan sediaan farmasi meliputi: Pemilihan, peencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas (25)}} \times 100\%$	SEKSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
		Persentase apotek dan toko obat yang dilakukan pengendalian dan pengawasan.	Persentase apotek dan toko obat yang terdaftar/berizin yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Apotek dan Toko Obat yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan}}{\text{Jumlah Apotek dan Toko Obat yang terdaftar/berizin}} \times 100\%$	
33	Meningkatnya Sarana Prasarana Kefarmasian Yang Berkualitas	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana kefarmasian sesuai standar.	Puskesmas dengan sarana dan prasarana kefarmasian sesuai Persentase puskesmas dengan sarana prasarana kefarmasian sesuai	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang sapsras kefarmasian sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$	
			standart (PMK 74 Tahun 2016)		

34	Terselenggaranya pengelolaan alat kesehatan dan Ketersediaan Obat	Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi.	Persentase puskesmas melakukan kalibrasi alat kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ALKES yang dilakukan kalibrasi}}{\text{Jumlah usulan ALKES yang dikalibrasi}} \times 100\%$	
		Persentase UPTD yang dilakukan Validasi ASPAK (Alkes) Sesuai Standar	UPTD yang divalidasi ASPAK nya berdasarkan sistem dan divalidasi ke UPTD Puskesmas secara langsung	$\frac{\text{UPTD yang divalidasi}}{\text{Puskesmas (25) + Labkes (1)}} \times 100\%$	
		Persentase Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80\% obat esensial}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	
35	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas	Persentase Bangunan Puskesmas Sesuai Standar	Bangunan Puskesmas sesuai standar yang dimaksud adalah tata ruang bangunan puskesmas yang mengacu pada prototipe Kemenkes sesuai dengan PMK No 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah bangunan Puskesmas sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh bangunan Puskesmas}} \times 100\%$	SEKSI FASILITAS KESEHATAN
		Persentase puskesmas yang capaian ASPAK minimal 60%	UPTD Puskesmas dengan capaian ASPAK minimal 60%	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang capaian ASPAK minimal 60\%}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	

				Jumlah seluruh Puskesmas	
		Persentase UPTD Puskesmas yang dilakukan Validasi ASPAK (sarana dan prasarana) sesuai standar	UPTD Puskemas dengan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar berdasarkan ASPAK dan telah dilakukan validasi data	$\frac{\text{UPTD Puskesmas yang divalidasi}}{\text{Jumlah seluruh bangunan Puskesmas (25)}} \times 100\%$	

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar



Dr. H. NORIPANSYAH, S.SiT, MKM
Penata TK. I
NIP. 19801107 200312 1 004

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR : 100.3.5.4/20/DINKES/2026
 TANGGAL : 15 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
 TAHUN 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dibuat 1x dalam setahun selama 3 bulan	1 Dokumen	SUBBAG PERENCANAAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dibuat 1x dalam setahun selama 1 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran dibuat 1x dalam setahun selama 3 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pergeseran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran dibuat 1x dalam setahun selama 1 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dibuat 1x dalam setahun selama 3 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan dibuat 1x dalam setahun selama 1 bulan	1 Dokumen	

2	Terlaksananya penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibuat 1x dalam setahun selama 3 bulan	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dibuat 1x dalam setahun dalam waktu 3 bulan	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Capaian SPM Triwulan	Jumlah Laporan Capaian SPM Triwulan	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Kinerja Triwulan	Dokumen Laporan Kinerja Triwulan dibuat 4 kali dalam satu tahun setiap 3 bulan sekali	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Realisasi Fisik Keuangan	Dokumen Laporan Realisasi Fisik Keuangan dibuat setiap bulan dalam satu tahun	12 Laporan	
3	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dibuat setiap tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Dokumen Rencana Kerja (Renja) dibuat setiap tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU)	Laporan Dokumen SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dibuat 2 kali dalam satu tahun	2 Dokumen	
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	
4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja	Laporan Dokumen perjanjian Kinerja dibuat 2 kali dalam satu tahun	2 Dokumen	

		Jumlah Dokumen Rencana Aksi	Laporan Dokumen Rencana Aksi dibuat 2 kali dalam satu tahun	2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Tabel Keselarasan	Laporan Dokumen Tabel Keselarasan dibuat 1 kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pohon Kinerja Dinas Kesehatan	Laporan Dokumen Pohon Kinerja Dinas Kesehatan dibuat 2 kali dalam satu tahun	2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Proses Bisnis Dinas Kesehatan	Laporan Dokumen proses bisnis Dinas Kesehatan	2 Dokumen	
5	Terlaksananya Pengelolaan Pelaporan Berbasis Aplikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaporan E-Sakip	Laporan Pengelolaan Pelaporan Sakip dibuat satu kali setahun	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Berita Acara Usulan DAK Fisik dan Non Fisik Aplikasi Krisna	Laporan Berita Acara Usulan DAK Fisik Aplikasi Krisna dibuat satu kali setahun	2 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaporan Aplikasi E-Renggar DAK Fisik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaporan Aplikasi E- Renggar DAK Fisik dibuat 4 kali dalam satu tahun	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaporan Aplikasi E-Renggar DAK Non Fisik	Laporan Pengelolaan Pelaporan Aplikasi E-Renggar DAK Non Fisik dibuat 4 kali dalam satu tahun	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pelaporan Aladins	Laporan Pengelolaan Pelaporan Aladins dibuat 2 kali dalam satu tahun	2 Laporan	
6	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen usulan administrasi kenaikan gaji berkala yang diproses	Memproses pembuatan SK berkala dengan menghitung masa kerja sesuai tabel gaji dan pangkat golongan, dokumen yang diperlukan Sk berkala terakhir dan Sk Pangkat terakhir,waktu penyelesaian: 2 tahun sekali diusulkan	1 Dokumen	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

		Jumlah Dokumen usulan administrasi pensiun yang di proses	Proses usulan Pensiun Batas Usia, Janda, duda, dini, yatim, punah diusulkan ke BKD, dokumen yg diperlukan permohonan yang bersangkutan,DPCP,Hukdis,Susunan keluarga,SK CPNS,PNS,SK Pangkat akhir,Karis/karsu,karpeg, SK berkala, daftar gaji ,KTP, KK, waktu penyelesaian : per Bulan sesuai batas usia Pensiun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen usulan administrasi Karis/Karsu dan Taspen yang diproses	Terpenuhinya Jumlah dokumen Usulan Administrasi Karis/Karsu Taspen yang diproses	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen usulan administrasi perceraian yang diproses	Terpenuhinya Jumlah dokumen Usulan Administrasi Perceraian yang Diproses	1 Dokumen	
7	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Usulan Administrasi Fasilitas Kenaikan Pangkat PNS yang Diproses	Memproses usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dokumen yang diperlukan : dokumen dalam bentuk pdf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, waktu penyelesaian : per 2 bulan sesuai dengan periode kenaikan pangkat.	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Usulan Administrasi Cuti ASN yang Diproses	Memproses usulan cuti pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dokumen yang diperlukan : Formulir isian cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung, surat pernyataan pelimpahan tugas, dan dokumen pendukung lain.waktu penyelesaian : per hari.	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Usulan Administrasi Mutasi PNS yang Diproses	Memproses usulan mutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Usulan Administrasi Disiplin ASN yang Diproses	Memproses usulan disiplin ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Dokumen	

8	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Jumlah Dokumen Penilaian Hasil Perhitungan Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah dokumen penilaian hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja ASN	Melakukan input, memproses dan memantau pembuatan SKP melalui aplikasi Ekinerja dokumen yang diperlukan : Perjanjian Kinerja, bukti kegiatan/ dokumen pendukung dan peremajaan data pada aplikasi SIASN	1 Dokumen	
9	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	
10	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen usulan administrasi cuti pegawai yang diproses	Memproses usulan cuti pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dokumen yang diperlukan : Formulir isian cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung, surat pernyataan pelimpahan tugas, dan dokumen pendukung lain.waktu penyelesaian : per hari.	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen usulan administrasi fasilitas kenaikan pangkat yang diproses	Memproses usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dokumen yang diperlukan : dokumen dalam bentuk pdf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, waktu penyelesaian : per 2 bulan sesuai dengan periode kenaikan pangkat.	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen usulan administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang di proses	Memproses usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. waktu penyelesaian : per bulan.	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Usulan Administrasi Jabatan	Memproses usulan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 Dokumen	

		Fungsional (Kenaikan, Pemberhentian dan pembebasan jafung) yang di proses	waktu penyelesaian : per bulan.		
		Jumlah Dokumen usulan administrasi pencantuman gelar yang di proses	Memproses usulan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen perjanjian kerja dan SK tenaga kontrak daerah yang diproses	Memproses dokumen perjanjian kerja dan SK tenaga Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dokumen yang diperlukan : Berkas permohonan, telaahan staf, surat rekomendasi. waktu penyelesaian : per triwulan.	1 Dokumen	
11	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Dibuat Tahun Ini : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Laporan	
		Jumlah Laporan E-Lapor	Laporan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Dibuat Tahun Ini : E Lapor Per Semester / 6 Bulan Sekali	1 Laporan	
		Jumlah Laporan LHKPN	Laporan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Dibuat Tahun Ini : LHKPN Sekali Dalam 1 Tahun / 1 Tahun Sekali	1 Laporan	
12	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Absensi Pegawai yang Diproses	Laporan administrasi rekapitulasi absensi pegawai per bulan	1 Dokumen	
13	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai Dengan kebutuhan	Dokumen Pembelian Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik	Dokumen pembelian peralatan dan mesin yang di gunakan berfungsi dengan baik	1 Dokumen	

		Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik	Dokumen pemeliharaan peralatan dan mesin yang di gunakan berfungsi dengan baik	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan Penggandaan Barang yang Diproses	Dokumen Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan Penggandaan Barang yang diproses	1 Dokumen	
14	Terpelihara dan berfungsi gedung kantor dengan baik	Jumlah Laporan Aktivitas Pemeliharaan dan Berfungsinya Gedung Kantor Dinas Kesehatan Dengan Baik	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor yang di susun berupa dokumen perencanaan, pekerjaan konstruksi, pengawasan	1 Dokumen	
15	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Dokumen Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor yang di susun berupa dokumen perencanaan, pekerjaan konstruksi, pengawasan	3 Dok	
		Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Dok	
		Jumlah laporan pelaksanaan gedung kantor	Laporan pelaksanaan gedung kantor	1 Lap	
16	Terselenggaranya kegiatan kantor	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Petugas Kebersihan Kantor	Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Petugas Kebersihan per tahun	1 Dokumen	

		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Bahan Logistik Kantor	Dokumen Administrasi Logistik Kantor pertahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban Cetak dan Penggandaan	Laporan administrasi barang cetakan dan pengadaan per bulan	1 Dokumen	
		Dokumen pertanggungjawaban bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, kunjungan tamu, rapat koordinasi, tagihan listrik, peralatan rumah tangga	Jumlah kesediaan bahan logistik kantor, barang cetak dan penggandaan, kunjungan tamu, rapat koordinasi, tagihan listrik, peralatan rumah tangga	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban bahan Logistik Kantor, barang cetak, dan penggandaan yang di proses	Dokumen pertanggungjawaban bahan logistik kantor, barang cetak, dan penggandaan yang di proses	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen SIPD yang Diproses	Dokumen SIPD yang diproses	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen AMEL yang Diproses	Dokumen AMEL yang diproses	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen SIRUP yang Diproses	Dokumen SIRUP yang diproses	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Non ASN yang Diproses	Dokumen BPJS ketenagakerjaan Non ASN yang diproses	1 Dokumen	
17	Terlaksananya keamanan gedung kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Aktivitas Keamanan gedung kantor Dinas Kesehatan Lantai 1,2 dan Aula	Laporan aktivitas keamanan gedung kantor Dinas Kesehatan lantai 1, 2 dan aula	1 Dokumen	

18	Terlaksananya kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan	umlah Laporan aktivitas kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan Lantai 1, 2 dan Aula	Laporan aktivitas kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan lantai 1, 2 dan aula	1 Dokumen	
19	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Absensi Pegawai	Laporan administrasi absensi pegawai per bulan	1 Lap	
		Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Jasa Surat Menyurat Bahan Pembersih dan Komponen Listrik	Dokumen administrasi pertanggung jawaban jasa surat menyurat. Bahan pembersih dan komponen listrik per bulan	1 Dokumen	
20	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor Penyelenggaraan penunjang pengadministrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban jasa pelayanan umum kantor, jasa surat menyurat, tagihan jasa komunikasi, tagihan sumber daya air, tagihan listrik	Proses jumlah jasa pelayanan umum kantor,jasa surat menyurat, tagihan listrik, jasa komunikasi,tagihan sumberdaya air,dokumen yang dipergunakan: SPJ beserta bukti	1 Dokumen	
21	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor Penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Tagihan Jasa Komunikasi, Tagihan Sumber Daya Air, dan Tagihan listrik yang Diproses	Dokumen administrasi pertanggung jawaban jasa pelayanan umum kantor, jasa surat menyurat, tagihan jasa komunikasi, tagihan sumber daya air dan tagihan listrik per bulan	1 Dokumen	
22	Pelaksanaan pembayaran Gaji	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	1. Dokumen pembayaran Gaji PNS dibuat setiap bulan dalam satu tahun	12 Dok	SUB BAGIAN KEUANGAN

	dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) dan Gaji PTT tepat waktu, sesuai aturan dan tepat sasaran		2. Dokumen pembayaran Tunjangan PNS dibuat setiap bulan dalam satu tahun		
		Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan P3K	1. Dokumen pembayaran Gaji PPPK dibuat setiap bulan dalam satu tahun 2. Dokumen pembayaran Tunjangan PPPK dibuat setiap bulan dalam satu tahun	12 Dok	
		Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji ke.13	Dokumen pembayaran Gaji ke 13 dibuat 2 kali dalam satu tahun.	2 Dok	
		Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji THR	Dokumen pembayaran Gaji THR dibuat 2 kali dalam satu tahun.	2 Dok	
		Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji PTT	Dokumen pembayaran Gaji PTT dibuat setiap bulan dalam satu tahun.	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji Susulan, Terusan dan Kekurangan	Dokumen pembayaran Gaji ASN baik Terusan, Susulan maupun Kekurangan dibuat setiap bulan dalam satu tahun.	1 Dokumen	
23	Tersusunnya Pelaporan Keuangan	Jumlah Pembukuan Dokumen Keuangan	Pembukuan Dokumen Keuangan dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen data SPM dan SPP sesuai waktu yang ditentukan	Dokumen data SPM dan SPP dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Bukti Pajak sesuai waktu yang ditentukan	Dokumen Bukti Pajak dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tepat Waktu	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tepat Waktu dibuat satu kali dalam satu tahun	12 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Register Penutupan Kas sesuai waktu yang ditentukan	Dokumen Register Penutupan Kas dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	

24	Penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	Dokumen laporan keuangan tahunan perangkat daerah dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	Dokumen laporan keuangan semesteran perangkat daerah dibuat dua kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	Dokumen laporan keuangan bulanan perangkat daerah dibuat setiap bulan dalam satu tahun	12 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Buku Kas Umum	Dokumen Buku Kas Umum dibuat setiap bulan dalam satu tahun		
		Jumlah Dokumen SPP dan SPM LS dan GU	Dokumen SPP dan SPM LS dan GU dibuat setiap bulan dalam satu tahun	12 Dokumen	
25	Terselenggaranya penyusunan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen bukti verifikasi SPJ	Dokumen bukti verifikasi SPJ awal dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen rekap penomoran SI SPJ	Dokumen rekap penomoran SI SPJ penata usahaan keuangan dengan baik	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen bukti SIPD Langkar aplikasi BPKPAD	Dokumen bukti SIPD Langkar aplikasi BPKPAD	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen rekap penomoran RUP	Dokumen rekap penomoran RUP penata usahaan keuangan dengan baik	1 Dokumen	

		Jumlah Dokumen bukti SIPD aplikasi BPKPAD	Dokumen bukti SIPD Aplikasi BPKPAD	1 Dokumen	
26	Penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen pengadaan BMD perangkat daerah	Pengadaan BMD Perangkat Daerah Yang dilakukan dengan waktu selama 1 Tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen pembukuan BMD perangkat daerah	Pembukuan BMD Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen pengeluaran BMD perangkat daerah	Pengeluaran BMD Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1 tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen inventaris barang perangkat daerah	Inventarisasi BMD Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1 tahun	1 Dokumen	
27	Pelaporan BMD perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen pelaporan BMD perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD perangkat daerah	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan berkala Barang Habis Pakai perangkat daerah	Pelaporan Berkala Barang Habis Pakai Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1 (per triwulan)	4 Dok	
		Jumlah dokumen pelaporan berkala Rekonsiliasi BMD Perangkat daerah	Pelaporan Rekonsiliasi BMD Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1 tahun (per triwulan)	4 Dok	
		Jumlah dokumen pelaporan inventaris BMD perangkat daerah	Pelaporan Inventaris BMD Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1 tahun	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan mutasi barang perangkat daerah	Pelaporan Mutasi Barang Perangkat Daerah yang dilakukan dengan waktu selama 1 tahun	1 Dokumen	
28	Perencanaan BMD perangkat	Jumlah Dokumen perencanaan BMD perangkat daerah sesuai	Perencanaan BMD Perangkat Daerah Yang dibuat dengan waktu selama 3 bulan	1 Dokumen	

	daerah yang berkualitas	identifikasi kebutuhan BMD			
		Jumlah Dokumen perencanaan pemeliharaan BMD perangkat daerah sesuai identifikasi BMD	Perencanaan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah yang dibuat dengan waktu selama 3 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen perencanaan penghapusan BMD dari Daftar Aset Tetap	Perencanaan Penghapusan BMD Perangkat Daerah yang dibuat dengan waktu selama 3 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen perencanaan distribusi pengadaan BMD	Perencanaan Distribusi BMD Perangkat Daerah yang dibuat dengan waktu selama 3 bulan	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan Barang Pakai Habis	Perencanaan Kebutuhan Barang Habis Pakai Perangkat Daerah yang dibuat dengan waktu selama 3 bulan	1 Dokumen	
29	Terselenggaranya Penyusunan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penerimaan retribusi	Dokumen Penerimaan Retribusi dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen rekap penyeteroran retribusi	Dokumen Rekap Penyeteroran Retribusi dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen bukti STS dari BANK	Dokumen bukti STS dari BANK dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen bukti SISAPAT aplikasi BPKAD	Dokumen bukti SISAPAT Aplikasi BPKPAD dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen bukti SIPD RI dan LANGKAR aplikasi BPKAD	Dokumen bukti SIPD RI dan LANGKAR Aplikasi BPKPAD dibuat satu kali dalam satu tahun	1 Dokumen	
30	Terlaksananya penyusunan laporan Pencegahan	Jumlah Laporan penemuan terduga TB di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan terduga TB di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

	Penyakit Menular				PENYAKIT MENULAR
		Jumlah Laporan pemeriksaan orang resiko HIV di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan pemeriksaan orang resiko HIV di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan pemeriksaan orang resiko malaria di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan pemeriksaan orang resiko malaria di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan pemberian obat kecacangan di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan pemberian obat kecacangan di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
31	Terlaksananya penyusunan laporan pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Laporan penemuan orang dengan TB di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan orang dengan TB di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan pengobatan sembuh/lengkap orang dengan TB di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan pengobatan sembuh/lengkap orang dengan TB di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan orang dengan HIV di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan orang dengan HIV di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan kasus malaria di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus malaria di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	

		Jumlah Laporan penemuan kasus demam berdarah di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus demam berdarah di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan kasus hepatitis B di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus hepatitis B di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan kasus Diare di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus diare di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan kasus ISPA di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus ISPA di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan kasus Kusta/Frambusia di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus Kusta/Frambusia di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan penemuan kasus rabies di semua fasilitas pelayanan kesehatan	Laporan penemuan kasus rabies di semua fasilitas pelayanan kesehatan	12 Laporan	
32	Terlaksananya penyusunan laporan pencegahan Penyakit Tidak Menular dan	Jumlah laporan deteksi dini hipertensi	Laporan hasil capaian deteksi dini hipertensi yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

	Kesehatan jiwa				MENULAR
		Jumlah laporan deteksi dini diabetes melitus	Laporan hasil capaian deteksi dini diabetes melitus yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		jumlah laporan deteksi dini stroke	Laporan hasil capaian deteksi dini stroke yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		Jumlah laporan deteksi dini kanker serviks	Laporan hasil capaian deteksi dini kanker serviks yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		Jumlah laporan deteksi dini kanker payudara	Laporan hasil capaian deteksi dini kanker payudara yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		Jumlah laporan deteksi dini gangguan indera fungsional penglihatan	Laporan hasil capaian deteksi dini gangguan indera fungsional penglihatan yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		Jumlah laporan deteksi dini gangguan indera fungsional pendengaran	Laporan hasil capaian deteksi dini gangguan indera fungsional pendengaran yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		Jumlah laporan deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronik	Laporan hasil capaian deteksi dini PPOK yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
		Jumlah laporan deteksi dini obesitas	Laporan hasil capaian deteksi dini obesitas yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	

		Jumlah laporan deteksi dini kesehatan jiwa	Laporan hasil capaian deteksi dini obesitas yang didapatkan dari laporan 25 puskesmas setiap bulan	12 Laporan	
33	Terlaksananya penyusunan laporan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	Jumlah laporan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus sesuai standar	Laporan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus sesuai standar	12 Laporan	
		Jumlah laporan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	Laporan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	12 Laporan	
		Jumlah laporan pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ Berat sesuai standar	Laporan pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ Berat sesuai standar	12 Laporan	
		Jumlah laporan Penderita hipertensi yang tekanan darahnya terkendali	Laporan penderita hipertensi yang tekanan darahnya terkendali	12 Laporan	
		Jumlah laporan Penderita diabetes melitus (DM) yang gula darahnya terkendali	Laporan penderita diabetes melitus (DM) yang gula darahnya terkendali	12 Laporan	

34	Terlaksananya penyusunan laporan pelayanan surveilans epidemiologi	Jumlah Laporan Surveilans terpadu penyakit secara lengkap	Laporan surveilan terpadu penyakit secara lengkap	12 Laporan	SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
		Jumlah Laporan Surveilans terpadu penyakit secara tepat waktu	Laporan surveilan terpadu penyakit secara tepat waktu	12 Laporan	
		Jumlah Laporan yang merespon KLB dalam waktu 1 x 24 jam	Laporan yang merespon KLB dalam waktu 1 x 24 jam	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Laporan pemeriksaan kesehatan jemaah haji	12 Laporan	
35	Terlaksananya penyusunan laporan program imunisasi	Jumlah Laporan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Laporan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Cakupan Imunisasi Tetanus pada wanita usia subur (WUS)	Laporan Cakupan Imunisasi Tetanus pada wanita usia subur (WUS)	12 Laporan	
36	Terlaksananya penyusunan laporan pelayanan gizi	Jumlah laporan Gizi Buruk Ditangani Sesuai Tata Laksana	Laporan Gizi Buruk Ditangani sesuai Tata Laksana	12 Laporan	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
		Jumlah laporan gizi kurang mendapatkan PMT	Laporan Gizi Kurang mendapatkan PMT	12 Laporan	
		Jumlah laporan Cakupan Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Laporan Cakupan Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	12 Laporan	
		Jumlah laporan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 Tablet/Multiple Micronutrient Supplement (MMS)	Laporan bumil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 Tablet/Multiple Micronutrient Supplement (MMS)	12 Laporan	

		Jumlah laporan bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Laporan bumil KEK mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	12 Laporan	
37	Terlaksananya penyusunan laporan kunjungan Pelayanan siklus hidup	Jumlah Laporan Kunjungan Ibu Hamil	Laporan Kunjungan Ibu Hamil	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Kunjungan Balita	Laporan Kunjungan Balita	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Kunjungan Usia Produktif	Laporan Kunjungan Usia Produktif	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Kunjungan Lansia	Laporan Kunjungan Usia Lansia	12 Laporan	
38	Terlaksananya penyusunan laporan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Puskesmas	Jumlah Laporan Puskesmas yang memiliki pengelolaan air li4413`mbah	Puskesmas yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	12 Laporan	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
		Jumlah Laporan Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Limbah Medis)	Puskesmas yang memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar (Limbah Medis)	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Laporan Tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	12 Laporan	

		Jumlah Laporan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Laporan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang dilakukan pengawasan sesuai Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	1 Dokumen	
		Jumlah Laporan desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS)	Laporan desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS)	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Laporan Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya sesuai Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	12 Laporan	
39	Terlaksananya penyusunan laporan kesehatan kerja dan Olahraga di sektor formal	Jumlah Laporan Sektor Formal melaksanakan kesehatan Kerja	Laporan sektor formal melaksanakan kesehatan kerja	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Sektor Formal melaksanakan aktifitas fisik (Olahrga)	Laporan sektor formal melaksanakan aktivitas fisik (Olahraga)/ Puskesmas yang memiliki Laporan Kelompok Masyarakat yang melakukan aktivitas fisik	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Sektor Formal yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Puskesmas yang memiliki laporan sektor formal yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	12 Laporan	
40	Terlaksananya penyusunan laporan Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas	Jumlah laporan Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas	Laporan Puskesmas yang melaksanakan Pembinaan Germas	12 Laporan	SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		Jumlah Laporan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Sekolah.	Puskesmas yang melaksanakan pemantauan dan pembinaan PHBS di lingkungan sekolah	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan sarana kesehatan	Puskesmas yang melaksanakan pemantauan dan pembinaan PHBS di lingkungan sarana kesehatan	1 Laporan	

		Jumlah Laporan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan tempat-tempat umum	Puskesmas yang melaksanakan pemantauan dan pembinaan PHBS di lingkungan tempat-tempat umum	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan tempat kerja	Puskesmas yang melaksanakan pemantauan dan pembinaan PHBS di lingkungan tempat kerja	1 Laporan	
41	Terlaksananya penyusunan laporan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Jumlah laporan posyandu aktif	Posyandu aktif adalah Posyandu yang memenuhi 3 (tiga) indikator, yaitu Melakukan kegiatan rutin posyandu setiap bulan (minimal 10 x dalam setahun, melayani siklus hidup (memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil/ menyusui, bayi/balita, remaja/usia sekolah, usia produktif dan lansia) dan memiliki minimal 5 orang kader	1 Laporan	
42	Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat (UKBM)	Jumlah laporan Saka Bakti Husada (SBH) aktif	Laporan Saka Bakti Husada (SBH) aktif	1 Laporan	

		Jumlah laporan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Laporan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	1 Laporan	
		Jumlah laporan Posyandu Siklus Hidup	Laporan Posyandu Siklus Hidup	25 Laporan	
43	Terlaksananya penyusunan laporan akses pembiayaan kesehatan yang berkualitas ke seluruh penduduk	Jumlah laporan Cakupan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan (triwulan)	Laporan Cakupan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan (triwulan)	4 Laporan	SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN RUJUKAN
		Jumlah Laporan Progress bulanan aktivasi BPJS Kesehatan (bulanan)	Laporan progress bulanan aktivasi BPJS Kesehatan (bulanan)	12 Laporan	
44	Terlaksananya penyusunan laporan pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	jumlah Laporan skrining peserta JKN yang beresiko (triwulan)	Laporan skrining peserta JKN yang beresiko (triwulan)	4 Laporan	
		Jumlah laporan evaluasi KBK puskesmas	Laporan evaluasi KBK puskesmas	12 Laporan	
45	Terlaksananya penyusunan laporan	Jumlah Laporan aktivasi dan keaktifan Sisrute di Faskes tingkat pertama (triwulan)	Laporan aktivasi dan keaktifan Sisrute di Faskes tingkat pertama (triwulan)	4 Laporan	
	pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Laporan sisrute Rumah Sakit di kabupaten Banjar (triwulan)	Laporan sisrute Rumah Sakit di kabupaten Banjar (triwulan)	4 Laporan	
		Jumlah Laporan pelaksanaan telemedicine (triwulan)	Laporan pelaksanaan telemedicine (triwulan)	4 Laporan	

46	Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjutan yang bermutu	Jumlah Laporan pembinaan RS (triwulan)	Laporan pembinaan RS (triwulan)	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Pembinaan Mutu Yankes Lanjutan (triwulan)	Laporan Pembinaan Mutu Yankes Lanjutan (triwulan)	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter) yang dibina mutu pelayanan	Laporan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter) yang dibina mutu pelayanan	4 Laporan	
47	Terlaksananya Penyusunan laporan Perizinan Bidang Kesehatan sesuai standar	Jumlah laporan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Laporan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	12 laporan	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERIZINAN
		Jumlah laporan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Laporan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	12 laporan	
		Jumlah laporan Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Laporan Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	12 laporan	

48	Terlaksananya Penyusunan dokumen Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Laporan Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Laporan Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Griya Sehat yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Laporan Griya Sehat yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok ASMAN TOGA	Laporan Puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok ASMAN TOGA	12 Laporan	

		Jumlah Laporan Puskesmas yang melakukan pendataan dan pembinaan kepada penyehat Tradisional	Laporan Puskesmas yang melakukan Pendataan dan Pembinaan kepada Penyehat Tradisional	12 Laporan	
49	Terlaksananya Penyusunan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah laporan Puskesmas dengan hasil assesmen klasifikasi Tim Pembina Cluster Binaan minimal cukup	Puskesmas yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Laporan	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN AKREDITASI
		Jumlah Laporan Puskesmas yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Puskesmas yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	2 Laporan	
		Jumlah Laporan Klinik yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Klinik yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	2 Laporan	
		Jumlah Laporan TPMD dan TPMDG yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	TPMD/TPMDG yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	4 Laporan	
		Jumlah Laporan Labkesda yang dilakukan pengukuran Indikator	Labkes yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	4 Laporan	
		Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan			

		Jumlah Laporan labkesmas yang mendapatkan pembinaan labkesmas tier 1 dan 2	Laporan pembinaan pelayanan Labkesmas Tier 1 dan Tier 2	13 Laporan	
		Jumlah Laporan puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	Laporan puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Puskesmas yang melaksanakan Pemeriksaan Gratis	Laporan Puskesmas yang melaksanakan Pemeriksaan Gratis	12 Laporan	
50	Terlaksananya penyusunan laporan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) Fasyankes	Jumlah laporan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) fasilitas pelayanan kesehatan	Merupakan data kunjungan pasien yang diinput melalui aplikasi Rekam Medis Elektronik secara realtime	4 Laporan	
51	Terlaksananya penyusunan laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Laporan Fasyankes yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan	4 Laporan	
		Jumlah laporan hasil bimtek sumber daya manusia	Laporan hasil bimtek sumber daya manusia kesehatan di Fasyankes	4 Laporan	
		kesehatan di Fasyankes			
		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi sumber daya manusia kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi sumber daya manusia kesehatan di Fasyankes	4 Laporan	

		Jumlah Dokumen Deskripsi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banjar	Dokumen Deskripsi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banjar	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di UPTD dan RSUD	Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Di UPTD dan RSUD	1 Dokumen	
		Jumlah laporan penerimaan Program Intership dokter Indonesia (PIDI)	Dokumen yang dimaksud ialah Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Penetapan Peserta, Pendamping, dan Wahana Program Internship Dokter Indonesia. Dokumen ini dibuat satu kali dalam setahun pada saat penerimaan PIDI bulan Agustus 2025	1 Laporan	
52	Terlaksananya penyusunan laporan pengelolaan alat kesehatan dan ketersediaan obat	Jumlah laporan alat kesehatan yang terkalibrasi	Laporan Alat Kesehatan yang terkalibrasi	4 Laporan	SEKSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
		Jumlah laporan Puskesmas yang dilakukan Validasi Aspak	Laporan Puskesmas yang dilakukan Validasi Aspak Alat Kesehatan (ALKES) Sesuai Standar	4 Laporan	

		alat kesehatan (ALKES) Sesuai Standar			
		Jumlah laporan Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	Laporan Ketersediaan obat esensial di Puskesmas	4 Laporan	
53	Terlaksananya penyusunan laporan Pengelolaan kefarmasian	Jumlah laporan ketersediaan obat	Laporan ketersediaan obat	4 Laporan	
		Jumlah laporan stok opname tahunan	Laporan stok opname tahunan	1 Laporan	
		Jumlah laporan fasilitas pelayanan kesehatan (apotik, klinik dan rumah sakit) yang melaporkan di Aplikasi Pelaporan Narkotika dan psikotropika (SIPNAP)	Laporan fasilitas pelayanan kesehatan (apotik, klinik dan rumah sakit) yang melaporkan di Aplikasi Pelaporan Narkotika dan psikotropika (SIPNAP)	4 Laporan	
		Jumlah laporan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan di Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Apotik kefarmasian (SIMONA)	Laporan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan di Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Apotik kefarmasian (SIMONA)	4 Laporan	
54	Terlaksananya penyusunan laporan Sarana	Jumlah laporan puskesmas dengan ruang farmasian sesuai standart	Laporan puskesmas dengan ruang farmasian sesuai standart	4 Laporan	
	Prasarana Kefarmasian				

55	Terlaksananya penyusunan laporan Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah laporan bangunan puskesmas sesuai standar			STAFF SEKSI FASILITAS KESEHATAN
		Jumlah laporan puskesmas yang mencapai ASPAK minimal 60%	Laporan puskesmas yang mencapai ASPAK minimal 60%	17 Laporan	
		Jumlah laporan Puskesmas yang dilakukan Validasi ASPAK (sarana prasarana) Sesuai Standar	Laporan Puskesmas yang dilakukan Validasi ASPAK (sarana prasarana) sesuai standar	25 Laporan	

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar



Dr. H. NORIPANSYAH, S.SiT, MKM
Penata TK. I
NIP. 19801107 200312 1 004